

**AIR SEBAGAI BARANG PUBLIK :
STUDI EMPIRIS PENGARUH FAKTOR SOSIAL-EKONOMI
TERHADAP PEMAKAIAN AIR BERSIH DI KOTA BANDUNG**

Ragam Santika

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Winayamukti

ABSTRAK

The study was aimed at finding the socio-economic factors influencing the use of clean water. The result of the study was hoped to be a reference for regulation on the “cost” of water for keeping a balance supply, mostly in big cities having problem with clean water as happen to Bandung.

The study was conducted on respondents comprising 100 families chosen randomly. The respondents were asked to fill in a questionnaire about the use of water as well as socio-economic factors covering the educational degree, occupation, and income payment. The validity of their answers was then checked through a limited observation. The data gathered was then analyzed by using One-way ANOVA to see whether the socio-economic factors influence the use of water or not.

The conclusions of this study are : (i) the public need on clean water is basically the need on public object, (ii) the value of clean water covers “use value” and “exchange value”, (iii) consumers’ sacrifice to get clean water called as “cost” basically can be well charged considering the “use value” and “exchange value” it has, (iv) a higher water “cost” can be charged to those who has a better income, (v) if the procurement of clean water can be served by the government, the water tariff can be adjusted progressively to income - to guarantee the quantity and quality of clean water needed by public.

Keywords: Clean Water, Public Object, One-Way ANOVA

1. PENDAHULUAN

Air yang pernah dianggap sebagai barang yang dapat diperoleh dari alam dengan cuma-cuma kini sudah mengalami proses komoditisasi (ekonomik). Air merupakan substansi penting dalam mendukung kehidupan manusia. Tanpa air, kesinambungan hidup manusia akan terganggu yang pada akhirnya akan menyebabkan berkurangnya keseimbangan lingkungan hidup manusia. Seiring dengan penambahan populasi manusia, air bersih semakin menjadi sumberdaya yang langka dan tidak ada penggantinya. Ini merupakan permasalahan utama yang dihadapi terkait dengan ketersediaan air bersih.

Adanya *gap* antara permintaan dan penyediaan infrastruktur air bersih yang tidak dengan mudah untuk dipenuhi, menjadikan beban yang amat berat bagi pemerintah untuk mengatasinya. Celah ini tercipta akibat makin meningkatnya tuntutan permintaan tingkat layanan (*level of service*) yang belum dapat diikuti oleh pemenuhan kebutuhannya. Kawasan perkotaan dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat telah membuat permintaan air bersih yang semakin tinggi dan jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kelangkaan dan turunnya kualitas hidup masyarakat kota.

Sebagai suatu barang publik yang ketersediaannya makin terbatas, pengelolaan air bersih menjadi salah satu tugas utama otoritas publik untuk melakukan pengaturan serta pelayanan publik di bidang penyediaan air bersih. Pengaturan produksi, distribusi dan konsumsi air bersih oleh pemerintah yang didasarkan atas adanya "*public obligation*" yang dapat memastikan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pasokan air bersih tersebut sekaligus mendukung usaha-usaha konservasi lingkungan, terutama konservasi atas sumberdaya air tersebut. Hal ini dilakukan pemerintah melalui penyelenggaraan pelayanan air bersih secara langsung maupun dengan pemberlakuan regulasi-regulasi terkait. Produk hukum yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan air antara lain adalah UU no. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan PP No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Selain sasaran-sasaran yang terukur yang terdapat dalam dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah, terdapat pula sasaran pencapaian *Millenium Development Goals (MDG)* tahun 2015 yaitu target nomor 7, "*...ensure environmental sustainability*" dan target nomor 10 yaitu "*reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and sanitation*".

Metropolitan Bandung adalah salah satu kawasan yang memiliki tingkat kesulitan air yang cukup tinggi. Telah banyak studi berkenaan dengan peran penyediaan air bersih (misalnya PDAM) bagi konsumennya, ataupun studi mengenai kelembagaan PDAM itu sendiri. Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, kajian ini pada dasarnya ingin melihat apakah terdapat pengaruh faktor sosial-ekonomi terhadap pemakaian air (sebagai barang publik) di kota metropolitan. Sumberdaya air dalam waktu tertentu di tempat tertentu (seperti halnya Kota Bandung), bersifat langka (*scarce*). Dengan mengetahui apakah faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap pemakaian air bersih, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi regulasi penetapan "harga" air demi menjaga keseimbangannya.

2. KERANGKA TEORITIS

Banyak orang berpikir bahwa nilai (*value*) suatu barang atau jasa, terhubung dengan nilai pasar barang/ jasa tersebut. Sebenarnya ada opini yang terkait dengan pandangan

tersebut. Yang pertama adalah dominannya indikator nilai tambah (*value added*) yang berarti tambahan nilai yang diciptakan dalam proses produksi. Pandangan kedua adalah, adanya dugaan kuat bahwa konsumen lebih menghargai barang dan jasa yang lebih mahal ketimbang yang murah. Hal ini berimplikasi pada pandangan akan rendahnya *value* air karena relatif murah nya “harga” air yang dibayarkan oleh konsumen.

Untuk mendapatkan air sebagai barang publik, konsumen harus mengeluarkan sejumlah pengorbanan (“harga”) untuk mendapatkannya. Sebenarnya harga ini adalah harga rata-rata dari pengeluaran agar penyediaan air sampai ke konsumen. Komponen dari biayanya di antaranya adalah biaya penyimpanan, transfer, pendistribusian, pemompaan dari dalam tanah. Harga ini sebenarnya tidak mencerminkan “biaya produksi” karena air tidak diproduksi melainkan pemberian dari alam yang harus dijaga bersama. Dengan dasar pertimbangan ini, “harga” air yang dibayarkan oleh konsumen tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan harga komoditas lainnya yang tercipta di pasar.

Barang Publik Sebagai Alasan Kegagalan Pasar

Berdasarkan penjelasan tersebut, sebagian penyediaan air untuk masyarakat dapat dikategorikan sebagai barang publik. Berdasarkan literatur ekonomi diketahui bahwa biaya marjinal memproduksi barang publik adalah nol. Selain itu, barang publik memiliki sifat *nonrivalry in use* seperti halnya keperluan akan adanya taman kota. Sifat lainnya adalah *lacking excludability* (Romer, 1996, halaman 126) sehingga tidak satupun dari anggota masyarakat yang tidak membutuhkannya (seperti halnya pertahanan negara). Implikasi dari sifat ini adalah harga pasar dari barang dan jasa tersebut bisa sama dengan (atau mendekati) nol. Oleh karenanya jika barang dan jasa tersebut dibutuhkan oleh masyarakat (dalam kasus ini adalah air bersih) maka negara harus mengupayakannya. Hal ini bukan berarti air *tidak memiliki nilai* melainkan tidak cocok menggunakan kekuatan pasar untuk menggambarkan pengorbanan yang harus dibayarkan oleh konsumen air bersih. Harga air seringkali tidak mencerminkan adanya polusi air. Jika terjadi polusi maka biayanya dapat diinternalisasikan kedalam harga air yang harus dibayarkan oleh konsumen.

Dalam teori ekonomi paling tidak terdapat dua pandangan mengenai harga suatu barang. Teori ekonomi modern lebih memfokuskan harga barang dalam suatu analisis pasar (kekuatan *demand* dan *supply*). Pandangan lain yakni ekonom klasik membedakan nilai pertukaran (*exchange value*) dan nilai kegunaan (*use value*). Di wilayah yang tidak mengalami kelangkaan air (karena daur air tidak terganggu, misalnya) harga air dapat saja didasarkan pada *use value*. Sedangkan di daerah yang mengalami kelangkaan air seperti halnya Kota Bandung harga selain dari *use value* juga dapat didasarkan pada *exchange value* yang menggambarkan kelangkaannya.

Dengan dasar pemikiran tersebut kajian ini ingin mendapatkan jawaban melalui respon para pengguna air bersih apakah faktor sosial ekonomi mempengaruhi konsumsi mereka akan air bersih. Jika ternyata faktor pendapatan (sebagai salah satu faktor sosial-ekonomi)

memang benar mempengaruhi, maka harga air sebenarnya dapat ditentukan lebih tinggi dengan tujuan menjaga keberlangsungan penyediaannya bagi seluruh masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Sampel

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif. Untuk menentukan sampel penelitian (responden) digunakan teknik *simple random sampling* yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2006 tercatat sebesar 2.771.138 jiwa sehingga ukuran sampel minimum yang dibutuhkan berdasarkan rumus Slovin (dalam Umar, 2004, halaman 74) adalah :

Dengan batasan minimum sebesar itu, dilakukan survei kepada 100 pemakai air bersih di Kota Bandung yang diambil secara acak sehingga terdapat variasi sampel dilihat dari jenis pekerjaan kepala keluarga (KK), tingkat pendidikan KK, serta penghasilan KK, yang juga dipilih dengan memperhatikan sebaran wilayah.

Pengumpulan Data

Kepada responden yang terpilih diberikan kuesioner yang berisi pertanyaan terutama sekitar pemakaian air. Yang menjadi responden adalah kepala keluarga atau orang yang mewakilinya (ayah/ ibu/ anak tertua yang berusia lebih dari 17 tahun). Pertanyaan mengenai seberapa banyak konsumsi air dibagi menurut jenis pemakaiannya yakni untuk: minum, masak (*food preparation*), mencuci pakaian, ibadah, dan pemakaian air untuk “lainnya”.

Ukuran yang disampaikan oleh responden tentang seberapa banyak konsumsi air bersih tersebut untuk setiap orang (atau keluarga) per jenis pemakaian, dikonfirmasi dengan mengamati alat-alat yang digunakan oleh anggota keluarga. Pada akhirnya konversi satuan pemakaian air disamakan kedalam “liter per orang per hari”

Variabel Penelitian

Variabel utama dalam kajian ini, adalah jumlah pemakaian air. Seperti yang telah dijelaskan dengan metode tertentu terkumpul data yang menggambarkan seberapa besar pemakaian air setiap orang setiap harinya.

Variabel kedua adalah pendidikan kepala keluarga. Pembagian pendidikan keluarga dimulai dari SD, SMP, Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana. Variabel pendidikan digunakan sebagai variabel yang memiliki keterkaitan dengan pemakaian air karena

terkait dengan pengetahuan tentang standar kesehatan dan kebersihan seluruh anggota keluarga.

Variabel ketiga adalah jenis pekerjaan kepala keluarga. Pembagian jenis pekerjaan kepala keluarga dibagi menurut : PNS, pensiunan, pegawai swasta, wiraswasta serta pilihan terbuka. Dalam proses selanjutnya jawaban terbuka tentang jenis pekerjaan ini diklasifikasikan kembali. Variabel jenis pekerjaan digunakan sebagai variabel yang memiliki keterkaitan dengan pemakaian air juga karena terkait dengan lingkungan kerja kepala keluarga yang menentukan standar kesehatan dan kebersihan dari seluruh anggota keluarga.

Variabel keempat adalah pendapatan kepala keluarga. Untuk mendapatkannya, dalam kuesioner pertanyaan untuk variabel ini adalah variabel terbuka yang dibagi menurut pendapatan tetap dan pendapatan tidak tetap. Untuk mengecek apakah data yang diberikan sudah relatif valid atau tidak, ditanyakan pula jenis dan jumlah pengeluaran yang dilakukan. Variabel pendapatan digunakan sebagai variabel yang memiliki keterkaitan dengan pemakaian air juga karena diduga terkait dengan jenis alat-alat rumah tangga yang digunakan oleh rumah tangga serta kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih.

Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah untuk mendapatkan ukuran pemusatan (rata-rata) dari variabel yang dicari, serta ukuran penyebarannya (*standard deviasi*). Selain itu untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari “pendidikan kepala keluarga (KK)”, “jenis pekerjaan KK”, serta “pendapatan KK” terhadap jumlah pemakaian air, digunakan metode *one way anova*.

Metode ini adalah metode deskriptif yang dapat menjawab apakah terdapat “perbedaan yang nyata (*significant*)” antara pemakaian air dari mereka yang berpendidikan tertentu (atau jenis pekerjaan tertentu ataupun tingkat pendapatan tertentu) dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya (Sudjana, 1992, halaman 302).

Metode ini memiliki prosedur yang menganalisis varians dari suatu variabel terikat yang bersifat kuantitatif (dalam kajian ini adalah jumlah pemakaian air per orang) dari faktor tunggal lain yang bersifat kualitatif (dalam kajian ini ada 3 yaitu : tingkat pendidikan, jenis pekerjaan serta tingkat pendapatan). Hipotesis yang digunakan dalam metode ini adalah “rata-rata pemakaian air dari sejumlah kategori adalah sama”. Bila hipotesis ini ditolak maka dapat dinyatakan bahwa rata-rata pemakaian air bersih antar kelompok kategori tersebut tidak sama, atau dengan kata lain terdapat “pengaruh” kategori tersebut (faktor sosial ekonomi yang terdiri atas tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan) terhadap pemakaian air.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kepala Rumah Tangga dan Pemakaian Air Bersih

Rata-rata pemakaian air bersih untuk keluarga yang kepala rumah tangganya tidak bersekolah adalah 139,13 liter/orang/hari, yang berpendidikan SD adalah 135,73 liter/orang/hari yang berpendidikan SMP 142,93 liter/orang/hari, yang berpendidikan SMA 140,47 liter/orang/hari, yang berpendidikan Diploma 140,80 liter/orang/hari, yang berpendidikan S1 148,08 liter/orang/hari, yang berpendidikan S2 153,75 liter/orang/hari, yang berpendidikan S3 157,33 liter/orang/hari. Selengkapnya tampak pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Pemakaian Air Menurut Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga
(liter/ orang/ hari)

Pendidikan Kepala Keluarga	Mean	N
Tidak Sekolah	139.1250	2
SD	135.7297	17
SMP	142.9306	16
SMA	140.4711	50
Diploma	140.8000	3
S1	148.0750	9
S2	153.7500	2
S3	157.3333	1
Pendidikan Lain	111.0000	1
Total	141.0359	100

Sumber : Pengolahan Data Survei

Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga dan Pemakaian Air Bersih

Rata-rata pemakaian air bersih untuk mereka yang pekerjaan kepala rumah tangganya PNS adalah 146,11 liter/orang/.hari; yang TNI Polri 131,30 liter/orang/.hari; yang Karyawan Swasta 141,93 liter/orang/.hari; yang Wiraswasta 142,14 liter/orang/.hari; yang Pensiunan 138,52 liter/orang/.hari; yang Buruh 136,52 liter/orang/.hari.. Selengkapnya tampak pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Pemakaian Air Menurut Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga
(liter/ orang/ hari)

Pekerjaan Kepala Keluarga	Mean	N
PNS	146.1053	9
TNI/Polri	131.3000	4
Karyawan Swasta	141.9333	13
Wiraswasta	142.1409	50

Pensiunan	138.5185	6
Buruh	136.5200	6
Pekerjaan Lainnya	137.2642	12
Total	141.0492	100

Sumber : Pengolahan Data Survei

Pendapatan Kepala Rumah Tangga dan Pemakaian Air Bersih

Rata-rata pemakaian air bersih untuk mereka yang penghasilan kepala rumah tangganya <Rp 500 ribu adalah 126,95 liter/orang/hari; yang berpenghasilan Rp 2 juta hingga <Rp2,5 juta adalah 149,90 liter/orang/hari dan yang berpenghasilan >Rp 4 juta adalah 181,67 liter/orang/hari. Selengkapnya tampak pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Pemakaian Air Menurut Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga
(liter/ orang/ hari)

Penghasilan Kepala Keluarga per Bulan	Mean	N
< Rp 500 ribu	126.9487	9
Rp 500 ribu - < Rp 1 juta	135.2541	27
Rp 1 juta - < Rp 1,5 juta	138.0649	17
Rp 1,5 juta - < Rp 2 juta	137.2051	17
Rp 2 juta - < Rp 2,5 juta	149.8961	17
Rp 2,5 juta - < Rp Rp 3 juta	164.1250	5
Rp 3 juta - < Rp 3,5 juta	157.4000	3
Rp 3,5 juta - < Rp 4 juta	164.6667	2
> Rp 4 juta	181.6667	1
Total	141.0492	100

Sumber : Pengolahan Data Survei

Pemakaian Air Bersih Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan, dan Pendapatan Kepala Keluarga

Untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan pendapatan kepala keluarga, terhadap pemakaian air digunakan metode *one way anova*. Ringkasan hasil perhitungan untuk itu dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4
Ringkasan Perhitungan *One Way Anova* Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Pemakaian Air Bersih

Variabel Terikat : Pemakaian Air Bersih	F stat	Prob.	Level of sig
Faktor (variabel bebas) :			
Tingkat Pendidikan	.794	.611	Ns

Jenis Pekerjaan	.773	.629	Ns
Tingkat Pendapatan	5.586	.000	99%

Sumber : Perhitungan menggunakan SPSS (Lampiran 1, 2 dan 3).

Keterangan : NS = tidak signifikan

Deskripsi hasil perhitungan tersebut adalah : (i) Tidak terdapat perbedaan pemakaian air bersih dari sejumlah responden yang digolongkan menurut tingkat pendidikannya, (ii) Tidak terdapat perbedaan pemakaian air bersih dari sejumlah responden yang digolongkan menurut jenis pekerjaannya, (iii) Terdapat perbedaan pemakaian air bersih dari sejumlah responden yang digolongkan menurut tingkat pendapatannya.

Dengan demikian dapat pula dinyatakan bahwa pendapatan kepala keluarga akan berpengaruh terhadap pemakaian air bersih dari seluruh anggota keluarga. Bila diamati dari rata-rata pemakaian air bersih untuk setiap klasifikasi tingkat pendidikan, tampak adanya perbedaan. Secara kasar tampak bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga semakin tinggi pula konsumsi rata-rata air bersih anggota keluarga. Dalam *one way anova* ternyata perbedaan tersebut tidak signifikan yang dapat dilihat dari rendahnya statistik F yang diperoleh. Bila diselaraskan dengan dugaan awal maka artinya pengetahuan dasar tentang kesehatan dan kebersihan tidak terkait langsung dengan tingkat pendidikan kepala keluarga. Hal ini dapat disebabkan oleh sudah relatif meratanya informasi akan kesehatan dan kebersihan yang diterima masyarakat di perkotaan seperti halnya Kota Bandung.

Jenis Pekerjaan kepala keluarga juga ternyata tidak dapat menjadi faktor pembeda rata-rata pemakaian air bersih yang tampak dari rendahnya statistik F yang diperoleh. Bila dikembalikan pada dugaan awal penelitian ini maka artinya lingkungan kerja kepala keluarga juga tidak mempengaruhi pemakaian air bersih anggota keluarga.

Satu-satunya variabel sosial ekonomi yang diduga berpengaruh terhadap pemakaian air bersih yang signifikan adalah pendapatan kepala keluarga. Bila dilihat hasil pengolahan data survei pada tabel sebelumnya tampak ada kecenderungan semakin tinggi rata-rata pendapatan kepala keluarga semakin tinggi pula pemakaian rata-rata air bersih dari seluruh anggota keluarga. Menurut dugaan awal, variabel tingkat pendapatan kepala keluarga dapat menyebabkan alat rumah tangga yang digunakan juga semakin banyak. Semakin tinggi pendapatan (berarti juga semakin tinggi daya beli) akan membuat peluang kepemilikan barang-barang seperti kendaraan, taman rumah, dan yang lainnya juga semakin tinggi. Kepemilikan alat-alat rumah tangga itulah yang patut diduga menyebabkan tinggi pemakaian air bersih (walaupun untuk beberapa jenis alat rumah tangga seperti halnya *shower* mandi, dapat menyebabkan pemakaian air lebih sedikit).

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelurusan literatur hingga hasil uji statistika data hasil survei dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Kebutuhan masyarakat luas terhadap air bersih pada dasarnya adalah kebutuhan akan barang publik.
2. Nilai yang terkandung dari air bersih adalah nilai kegunaannya (*use value*) dan nilai pertukarannya (*exchange value*) terutama untuk daerah sulit air seperti halnya Kota Bandung.
3. Pengorbanan konsumen untuk mendapatkan air bersih yang disebut sebagai “harga” pada dasarnya dapat dikenakan tinggi mengingat *use value* dan *exchange value* yang dimilikinya, serta untuk menjaga keberlangsungan penyediaan air bersih di perkotaan.
4. Karena pendapatan memiliki pengaruh terhadap tingkat pemakaian air bersih maka “harga” air yang lebih tinggi dapat dikenakan kepada mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi.
5. Terkait dengan adanya pengaruh dari pendapatan terhadap pemakaian air serta pemenuhan air bersih sebagai pemenuhan akan barang publik maka pengenaan tarif dapat mengikuti pola ini. Bila penyediaan air bersih dilakukan oleh pemerintah maka tarif air dapat dikenakan secara progresif terhadap pendapatan, untuk menjamin kuantitas dan kualitas air bersih yang dibutuhkan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Jhingan, ML (1994). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Romer, David. (1996). *Advanced Macroeconomics*. Singapore, McGraw Hill.
- Sudjana (1992). *Metoda Statistika*. Bandung, Penerbit Tarsito.
- Umar. Husein, (1998). *Riset Akuntansi*. Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- DPR RI (2004). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.
- DPR RI (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sekretariat Negara (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Sekretariat Negara (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

LAMPIRAN 1**ANOVA**

PENDIDIKAN *Pemakaian Air

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	7417.92	8	927.24	0.794	0.611
Within Groups	107359.4	92	1166.95		
Total	114777.3	100			

LAMPIRAN 2**ANOVA**

JENIS PEKERJAAN *Pemakaian Air

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	7214.824	8	901.853	0.773	0.629
Within Groups	107409.08	92	1167.49		
Total	114623.9	100			

LAMPIRAN 3**ANOVA**

PENDAPATAN *Pemakaian Air

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	48019.776	8	6002.472	5.586	.000
Within Groups	98858.416	92	1074.548		
Total	146878.19	100			